

## ABSTRAK

### **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor : 02/BPSK-PBG/Put-Arbitrase/III/2017)**

**Oleh :  
Shinta Dian Pakarti  
E1A013175**

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan barang yang semakin canggih dan beragam. Kondisi ini mendorong masyarakat (konsumen) tergiur memilikinya meskipun dana yang dimiliki tidak mencukupi. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat akan mudah memenuhi kebutuhannya. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 angka (7) menyebutkan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan konsumen sering kali terjadi perselisihan, tak jarang pelaku usaha kurang memperhatikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perselisihan ini termasuk sengketa konsumen, yang dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga penyelesaian *nonlitigasi* (tidak melalui pengadilan).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 7 UUPK dalam Putusan Nomor :02/BPSK-PBG/Put-Arbitrase/III/2017. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen serta arsip resmi, yaitu dengan menginventarisasikan data-data tersebut kemudian disajikan dalam uraian sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Putusan Nomor : 02/BPSK-PBG/Put-Arbitrase/III/2017 dapat diketahui bahwa penerapan Pasal 7 UUPK, secara keseluruhan sudah tepat dan adil bagi kedua pihak. Hakim menyatakan bahwa Pelaku usaha telah melanggar Pasal 7 huruf (a) UUPK yaitu tidak ada itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, Termohon tidak berhak menahan BPKB atas nama Sdr.Saryo dan berkewajiban menyerahkan BPKB tersebut kepada Pemohon, serta Pemohon menyertakan bukti-bukti yang disyaratkan Termohon.

Kata Kunci : Konsumen, Penerapan Pasal 7 , BPSK

**ABSTRACT****THE YURIDICAL STUDY ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 LAW  
NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION  
(Study of Decision Number : 02 / BPSK-PBG / Put-Arbitrase / III / 2017)**

**By :**  
**Shinta Dian Pakarti**  
**E1A013175**

*Advances in technology have spurred the company to produce more sophisticated and diverse goods. This condition encourages the community (consumers) are tempted to have it even if the funds are not sufficient. Through consumer financing, people will easily meet their needs. Presidential Regulation No. 9/2009 concerning Financing Institutions in Article 1 point (7) states that Consumer Finance is a financing activity for the procurement of goods based on consumer needs with installment payment system. In the implementation of consumer financing activities often occur disputes, not infrequently business actors pay less attention to its obligations as regulated in Article 7 of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection. These disputes include consumer disputes, which can be resolved through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) which is a non-litigation settlement institution (not through the courts).*

*The purpose of this study is to know the application of Article 7 UUPK in Decision Number: 02 / BPSK-PBG / Put-Arbitrase / III / 2017. Method approach used is normative juridical. The data used are secondary data in the form of legislation, literature, official documents and archives, namely by inventory data then presented in the systematic description.*

*Based on the results of research and discussion in Decision Number 02 / BPSK-PBG / Put-Arbitrase / III / 2017 it can be seen that the application of Article 7 UUPK, as a whole is right and fair for both parties. The judge stated that the business actor has violated Article 7 letter (a) UUPK that is not in good faith in carrying out its business activities, the Respondent has no right to hold BPKB on behalf of Saryono and obliged to submit the BPKB to the Applicant, and the Applicant shall include the required evidence Respondent.*

**Keywords:** *Consumer, Implementation of Article 7, BPSK*